



Pengendalian Operasional Kegiatan

MEI
2020

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jateng
gayeng



@kominfo_jtg



@kominfo.jateng



diskominfo.jatengprov.go.id



data.jatengprov.go.id

VISI - MISI GUBERNUR

VISI

Menuju Jateng Sejahtera & Berdikari

"Tetep mboten korupsi mboten ngapusi"

MISI

01
Membangun Masy Jateng yang religious, toleran & guyup untuk menjaga NKRI



02
Mempercepat RB yang Dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab./Kota

02



03
Memperkuat Kapasitas ekonomi rakyat & membuka lap. Kerja untuk mengurangi kemiskinan & pengangguran

03



04
Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya & mencintai lingkungan

04



Program Unggulan ke-3

Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

IKU DISKOMINFO 2018-2023

MISI 2

Mempercepat RB yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab./Kota

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean governance*)

SASARAN | INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO

1. Indeks domain Kebijakan internal SPBE
2. Indeks domain tata kelola SPBE
3. Indeks domain layanan SPBE
4. Laju pemanfaatan data sektoral
5. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)
6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo Prov. Jateng
7. Nilai SAKIP Diskominfo Prov. Jateng

PERUBAHAN RPJMD/ RKPD

No	OPD	Indikator Kinerja	RPJMD 2018 - 2023						Permasalahan	Usulan/Revisi			Penjelasan Pertimbangan	Ket
			R/T							Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023		
1	Diskominfo	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.64	2.76	2.88	3.00	3.12	3.24	Perubahan formula dan penambahan domain dalam penghitungan Index SPBE yang semula di tetapkan dalam Perpres 95 Tahun 2018	3.10	3.21	3.33	Index SPBE tahun 2021 sebesar 3,10 dengan berdasarkan perhitungan Index SPBE tahun 2018 sebesar 3,68, namun dengan menggunakan formula baru, akan terdapat penurunan sebesar 0,6 poin. Formula penilaian index SPBE yang baru dari 3 domain (kebijakan, tata kelola dan layanan) menjadi 4 domain (kebijakan, tata kelola, layanan dan manajemen)	Belum dapat diakomodir oleh Bappeda
		• Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2.69	2.82	2.94	3.06	3.18	3.30		3.41	3.53	3.65		
		• Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.30	2.40	2.51	2.61	2.71	2.82		3.71	3.83	3.95		
		• Indeks Domain Layanan SPBE	2.93	3.06	3.20	3.33	3.46	3.60		4.06	4.17	4.30		
		• Manajemen SPBE	-	-	-	-	-	-		1.19	1.31	1.43		
		• Laju Pemanfaatan Data Sektoral	8.21%	15.18%	30.36%	45.54%	60.72%	75.90 %	Pencapaian laju pemanfaatan data sektoral yang terlalu tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD	63.72%	81.76%	95.65%	Meningkatnya jumlah kunjungan pada aplikasi open data disebabkan konten open data selalu update oleh SKPD dan penambahan fitur baru yang dibutuhkan masyarakat	
		• Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	1	1	1	2	2	3	Hasil asesment Index KAMI oleh BSSN pada tahun 2019 sudah ada kenaikan dari target awal RPJMD sebesar 1 menjadi 2	2+	3	3	Meningkat dikarenakan semakin disempurnakannya pada aspek – aspek tata kelola teknologi pengelolaan asset kerangka kerja dan pengelolaan resiko	

CASCADING KOMINFO

Tujuan

**DIGITALISASI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN JAWA TENGAH**

Sasaran

Indeks
SPBE

**1. Meningkatnya Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Pemprov. Jateng**

- 1. Index Domain Kebijakan Internal SPBE
- 2. Index Domain Tata Kelola SPBE
- 3. Index Domain Layanan SPBE

**2. Meningkatnya pemanfaatan
Data dan Informasi Statistik
Sektoral**

Laju Pemanfaatan Data Sektoral

**3. Meningkatnya Keamanan
Informasi dalam Mendukung
SPBE Provinsi Jawa Tengah**

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)

CASCADING EX-BAU (SEKRETARIAT)

Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Dinas
Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Nilai
Kepuasan
Masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Komunikasi & Informatika Provinsi
Jateng

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah

• Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
• Diskominfo (Nilai Indeks
Kepuasan Masy)

APBD TA. 2020 DISKOMINFO PROV. JATENG

Rp. 80.226.600.000

BIDANG	JUMLAH				
	ANGGARAN (Rp) MURNI	PERUBAHAN ANGGARAN			
		REFOCUSING (COVID-19)		RASIONALISASI (PENURUNAN PAD)	
		ANGGARAN (Rp)	+ / (-)	ANGGARAN (Rp)	+ / (-)
TOTAL ANGGARAN	110.181.808.000	98.753.896.000	(11.427.912.000)	80.226.600.000	(18.527.296.000)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.469.978.000	16.831.910.000	(2.638.068.000)	16.831.910.000	-
BELANJA LANGSUNG	90.711.830.000	81.921.986.000	(8.789.844.000)	63.394.690.000	(18.527.296.000)
EX-BAU	9.543.114.000	8.068.629.000	(1.474.485.000)	7.406.155.000	(662.474.000)
SEKRETARIAT	9.543.114.000	8.068.629.000	(1.474.485.000)	7.406.155.000	(662.474.000)
URUSAN KOMINFO	74.235.391.000	68.322.702.000	(5.912.689.000)	52.192.481.000	(16.130.221.000)
IKP	30.132.107.000	26.290.641.000	(3.841.466.000)	16.505.081.000	(9.785.560.000)
TIK	31.601.500.000	30.735.058.000	(866.442.000)	26.642.388.000	(4.092.670.000)
E-GOV	12.501.784.000	11.297.003.000	(1.204.781.000)	9.045.012.000	(2.251.991.000)
URUSAN STATISTIK	3.423.550.000	2.816.123.000	(607.427.000)	1.991.277.000	(824.846.000)
STATISTIK	3.423.550.000	2.816.123.000	(607.427.000)	1.991.277.000	(824.846.000)
URUSAN PERSANDIAN	3.509.775.000	2.714.532.000	(795.243.000)	1.804.777.000	(909.755.000)
PERSANDIAN & KI	3.509.775.000	2.714.532.000	(795.243.000)	1.804.777.000	(909.755.000)

BL s.d MEI 2020



TARGET FISIK

13,322 M

21,02%



REAL KEU

15,135 M

23,88%



REAL FISIK

17,535 M

27,66%



DEVIASI FISIK

4,213 M

6,65%

DEVIASI KEU

(2,399M)

(3,79%)

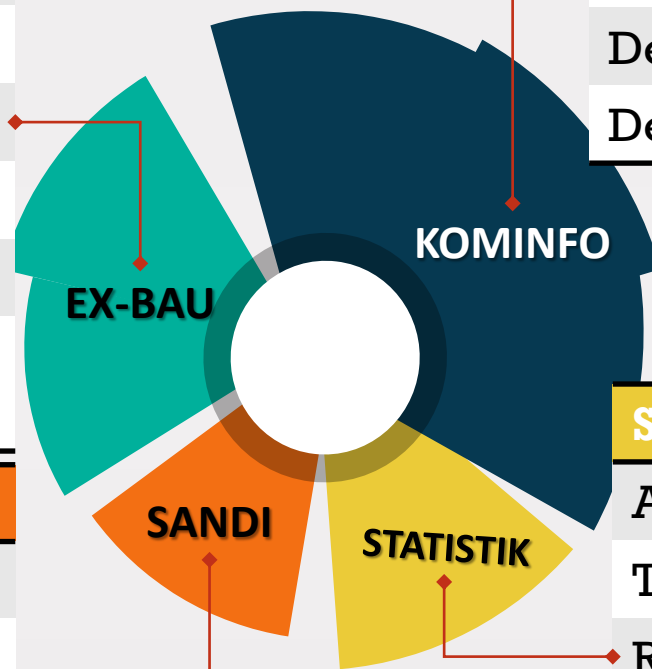
1. Pembayaran Air, Listrik sesuai kebutuhan (-681 Jt);
2. Proses Administrasi terutama pada kegiatan:
 - a. Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik (-1,37 M)
 - b. Pengelolaan Jaringan dacent (-156 jt)
 - c. Peningkatan pelayanan & dan informasi publik (-13,5 Jt)

REALISASI APBD per Urusan

Data Update per Tgl 8/06/2020

EX-BAU/ SEKRETARIAT		
Anggaran	7,406 M	
Target Fisik	3,151 M	42,56%
Real Keu	2,624 M	35,44%
Real Fisik	3,426 M	46,26%
Deviasi Fisik (+)	274,355 JT	3,70%
Deviasi Keu	(801,776 JT)	(10,83%)

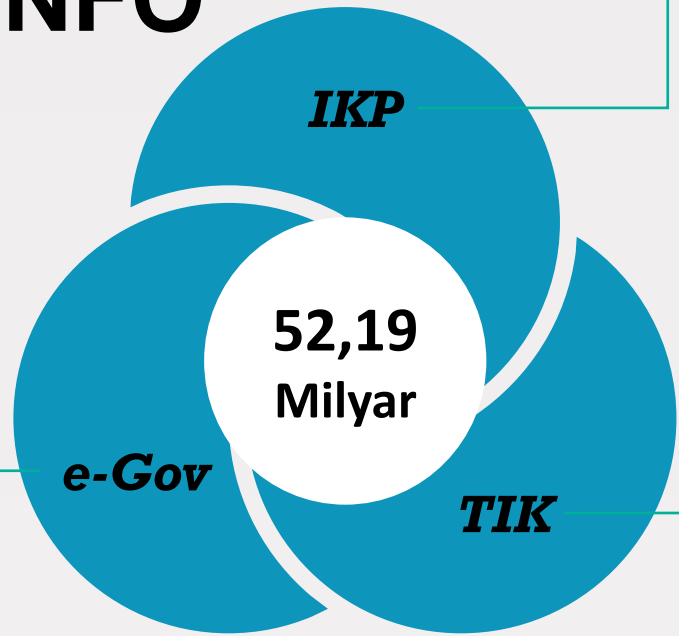
PERSANDIAN		
Anggaran	1,804 M	
Target Fisik	433,776 JT	24,03%
Real Keu	521,260 JT	28,88%
Real Fisik	546,015 JT	30,25%
Deviasi Fisik	112,238 JT	6,22%
Deviasi Keu	(24,755 JT)	(1,37%)



KOMINFO		
Anggaran	52,192 M	
Target Fisik	8,984 M	17,21%
Real Keu	11,201 M	21,46%
Real Fisik	12,752 M	24,43%
Deviasi Fisik (+)	3,768 M	7,22%
Deviasi Keu	(1,550 M)	(2,97%)

STATISTIK		
Anggaran	1,991 M	
Target Fisik	752,607 JT	37,80%
Real Keu	788,248 JT	39,59%
Real Fisik	810,928 JT	40,72%
Deviasi Fisik (+)	59,321 JT	2,93%
Deviasi Keu	(22,680 JT)	(1,14%)

KOMINFO



Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

16,505 M

Target Fisik	3,280 M	19,87%
Real Keu	3,260 M	19,76%
Real Fisik	4,640 M	28,12%
Deviasi Fisik (+)	1,360 M	8,24%
Deviasi Keu	(1,379 M)	(8,36%)



Pengemb Infrastruktur TIK

26,642 M

Target Fisik	2,555 M	9,59%
Real Keu	3,922 M	14,72%
Real Fisik	4,078 M	15,31%
Deviasi Fisik (+)	1,523 M	5,72%
Deviasi Keu	(156 JT)	(0,59%)

Pengemb E-Govt

9,045 M

Target Fisik	3,148 M	34,81%
Real Keu	4,018 M	44,43%
Real Fisik	4,032 M	44,59%
Deviasi Fisik (+)	884,332 Jt	9,78%
Deviasi Keu	(14,695 Jt)	(0,16%)

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
	SEKRETARIAT						
I	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		8.609.794.000		6,986,772,000		
1.	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	455.000.000	1 Dokumen	455,000,000	1 Dokumen	
2.	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	27.360.000	12 Bulan	18,850,000	12 Bulan	
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	2.160.004.000	12 Bulan	2,160,004,000	12 Bulan	
4.	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	142.500.000	12 Bulan	142,500,000	12 Bulan	
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	1.861.414.000	12 Bulan	1,831,510,000	12 Bulan	Pengurangan dari belanja honorarium narasumber
6.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	547.200.000	12 Bulan	279,195,000	12 Bulan	Pengurangan dari belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
7.	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	114.000.000	12 Bulan	68,360,000	12 Bulan	Pengurangan dari belanja makan minum rapat dan makan minum tamu
8.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	22.800.000	12 Bulan	12,800,000	12 Bulan	

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
SEKRETARIAT							
9.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	1.727.264.000	12 Bulan	1,150,837,000	12 Bulan	Pengurangan dari belanja jasa service kendaraan, belanja pengadaan suku cadang kendaraan, dan pemeliharaan gedung dan bangunan
10.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	256.500.000	12 Bulan	231,500,000	12 Bulan	
11.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	633.982.000	12 Bulan	235,313,000	12 Bulan	Pengurangan dari belanja pengadaan personal komputer
12.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	34 Orang	171.000.000	21 Orang	55,826,000	21 Orang	Pengurangan dari belanja honor narasumber, dan belanja makan minum peserta kegiatan & Pengiriman Peserta diklat
13.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	490.770.000	12 Bulan	345,077,000	12 Bulan	Pengurangan dari belanja ATK, belanja cetak dan belanja penggandaan

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
	SEKRETARIAT						
II	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		933.320.000		419,383,000		
14.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	698.320.000	7 Dokumen	366,263,000	7 Dokumen	Pengurangan dari belanja ATK, belanja honor narasumber, belanja penggandaan, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan perjalanan dinas luar daerah.
15.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	235.000.000	5 Dokumen	53,120,000	5 Dokumen	Pengurangan dari belanja ATK, belanja honor narasumber, belanja penggandaan, belanja makan minum rapat, belanja makan dan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan perjalanan dinas luar daerah.

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
	IKP						
III	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	64%	30.132.107.000	64%	16,505,081,000	71 %	
16.	Peningkatan pengelolaan informasi publik	78 Konten	24.000.000.000	50 Konten berita	14,007,356,000	132 konten berita	Pengurangan anggaran di seksi HMKP diprioritas untuk kegiatan pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama
17.	Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik	62 Kelompok	1.132.107.000	27 Kelompok Informasi	276,944,000	75 kelompok	Pengurangan anggaran kegiatan FK Metra dan PIKD krn adanya kebijakan physical distancing pencegahan penyebaran Covid-19. Sementara kegiatan FK Metra dan PIKD bersifat massal mengumpulkan orang banyak

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
	IKP						
18.	Analisis berita dan pendapat publik	88 Buah	5.000.000.000	88 Buah Rekomendasi	2,220,781,000	132 buah	Msh dapat melaksanakan kegiatan analisis media dgn output rekomendasi hasil analisa media cetak & online serta media sosial dikarenakan pengurangan anggaran di seksi opini publik diprioritaskan untuk kegiatan pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
	TIK						
IV	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	40%	31.601.500.000	40%	26,642,388,000	60%	
19.	Pengelolaan Jaringan dan Data Center	56 Lokasi	23.681.000.000	41 Lokasi	19,278,181,000	56 lokasi (20 titik)	FO tidak dilaksanakan pada tahun 2020, anggaran digunakan untuk
20.	Pengelolaan internet dan intranet	1400 MBps	7.175.000.000	1400 MBps	7,075,038,000	3000 MBps	Efisiensi dlm rangla pencegahan covid 19
21.	Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur	21 OPD	745.500.000	21 OPD	289,169,000	28 SKPD	Efisiensi dlm rangla pencegahan covid 19
	E-GOV						
V	Program Pengembangan E-Goverment	55%	12.501.784.000	55%	9,045,012,000	65%	
22.	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	11 Unit	9.618.652.000	10 Unit	6,928,886,000	13 unit	
23.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government	1000 Orang	666.423.000	800 Orang	489,499,000	1100 orang	
24.	Peningkatan Tata Kelola E-Goverment	3 Dokumen	2.216.709.000	3 Dokumen	1,626,627,000	4 dokumen	

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
STATISTIK							
VI	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi	Presentase ketersediaan data sektoral 79%	3.423.550.000	Presentase ketersediaan data sektoral 79%	1,991,277,000	Presentase ketersediaan data sektoral 89%	
		Presentase badan publik yang terbuka 76%		Presentase badan publik yang terbuka 76%		Presentase badan publik yang terbuka 84%	
25.	Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur	7000 Jenis	353.144.000	7000 Jenis	110,655,000	8000 Jenis	
26.	Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	8000 Jenis	505.665.000	8000 Jenis	151,426,000	9000 Jenis	
27.	Peningkatan pelayanan data dan informasi publik	65 Kelompok	366.058.000	65 Kelompok	181,243,000	70 kelompok	

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
STATISTIK							
28.	Peningkatan keterbukaan informasi publik	82%	2.198.683.000	75%	1,547,953,000	83%	Berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/SE.KI-JTG/III/2020 Tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Untuk Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Tanggal 23 Maret 2020, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk sementara waktu akan membatasi pelayanan dan konsultasi terkait permohonan penyelesaian sengketa informasi secara tatap muka dengan tetap memperhatikan kriteria social distance. Adanya pembatasan pelayanan tersebut diperkirakan akan mempengaruhi persentase penyelesaian sengketa sehingga perlu diadakan penyesuaian target persentase penyelesaian sengketa.

PENYESUAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 & 2021 PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TH 2020	RKPD – APBD TH 2020 INDUK		PASCA RASIONALISASI APBD TH 2020		TARGET RKPD TH 2021	KETERANGAN
		TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		
	PERSANDIAN						
VII	Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah	33.33%	3.509.775.000	33.33%	1,804,777,000	50%	
29.	Pengamanan persandian dan informasi	100 Unit	1.600.680.000	100 unit/Aplika si	691,971,000	149 unit/aplikasi	Outcome tetap dikarenakan belanja alat pendukung keamanan informasi tetap dilaksanakan sehingga mendukung sistem keamanan secara mandiri.
30.	Tata kelola persandian	201 Orang	865.909.000	119 orang	299,178,000	201 orang	Outcome berkurang dikarenakan adanya Rasionalisasi belanja hotel / fullboard sehingga volume dan outcome disesuaikan/dikurangi.
31.	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	15594 Buah	1.043.186.000	15.594 berita/buah	813,628,000	21.442 berita/buah	Outcome tidak ada perubahan, karena jalur komunikasi dengan sarana persandian tetap berjalan.
	JUMLAH		90.711.830.000		63,394,690,000		

PMPRB 2020 PUSAT (PEMDA)

Unit Utama

Nilai

Jawaban

Catatan/ Keterangan/ Penjelasan

0

▼ **KOMPONEN PENGUNGKIT (Pusat)**

0

▼ **PEMENUHAN (Pusat)**

0

▶ **MANAJEMEN PERUBAHAN (Pusat)**

0

▶ **DEREGULASI KEBIJAKAN (Pusat)**

0

▶ **PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (Pusat)**

0

▶ **PENATAAN TATALAKSANA (Pusat)** **Diskominfo**

0

▶ **PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (Pusat)**

0

▶ **PENGUATAN AKUNTABILITAS (Pusat)**

0

▶ **PENGUATAN PENGAWASAN (Pusat)**

0

▶ **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Pusat)** **Diskominfo**

0

▶ **HASIL ANTARA (Intermediate Outcome)**

0

▶ **REFORM**

0

▼ **HASIL**

0

▶ **AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

0

▶ **KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

0

▶ **PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN**

0

▶ **KINERJA ORGANISASI**

0

Pemenuhan
20%

8 Area
Perubahan

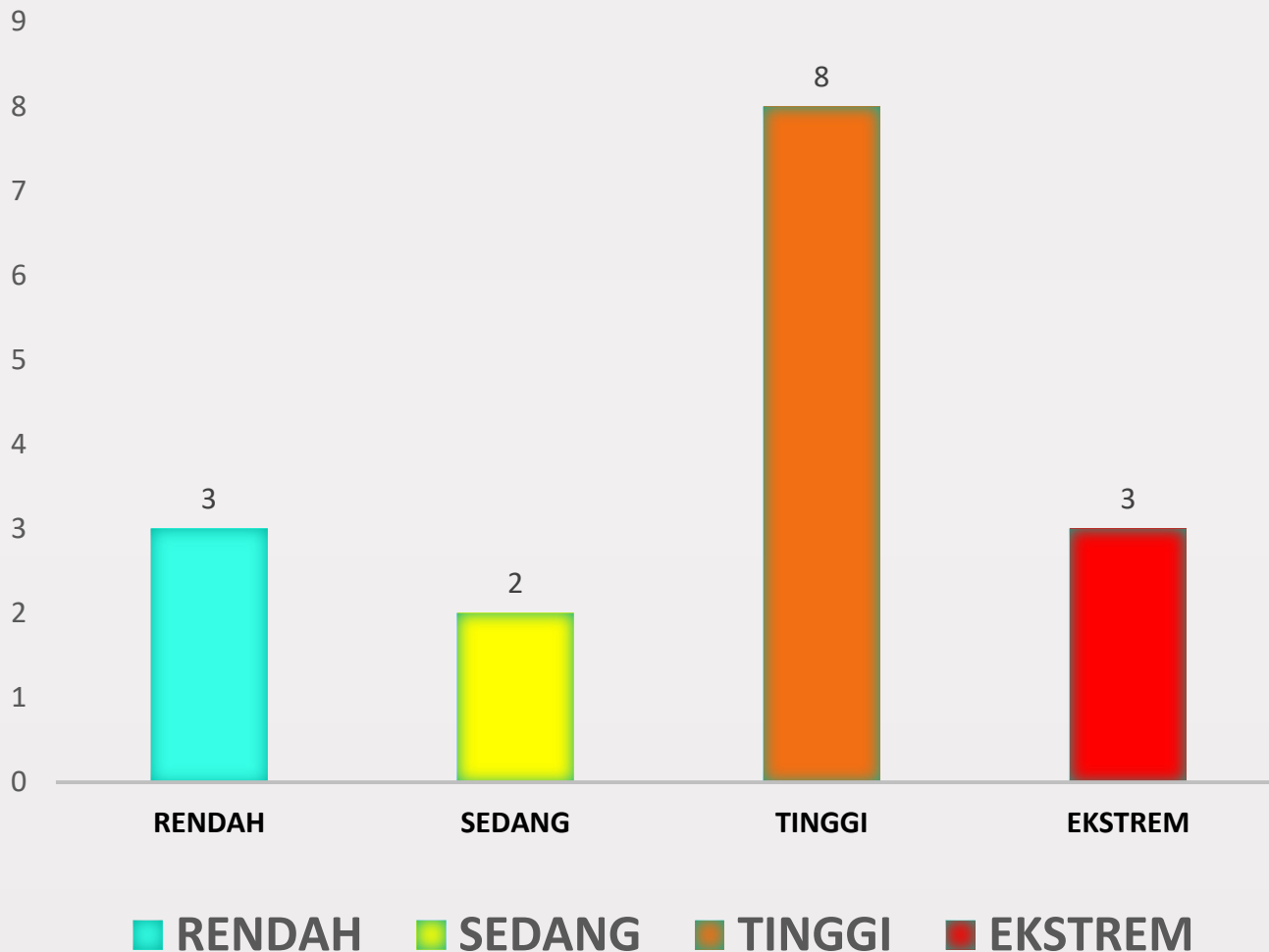
Pengisian Paling Lambat 30 Juni 2020

Evaluasi Mandiri PMPRB UNIT (DISKOMINFO)

URAIAN		TARGET	NILAI EVALUASI MANDIRI	KETERANGAN
A. KOMPONEN PENGUNGKIT			<i>Pengisian Paling Lambat 15 Juni 2020</i>	
1. PEMENUHAN (8 AREA PERUBAHAN)				
	1) Manajemen Perubahan	2,00	1,96	
	2) Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75	
	3) Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	0,1	Masih ada yang belum diisi
	4) Penataan Tata Laksana	1,00	0,84	Masih ada yang belum diisi
	5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40	1,30	
	6) Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	
	7) Penguatan Pengawasan	2,20	1,14	WBS dan benturan kepentingan menunggu konsep dari inspektorat
	8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,26	21

SPIP

TINGKAT RESIKO DISKOMINFO



Tingkat Resiko ***Tinggi*** pada Kegiatan:

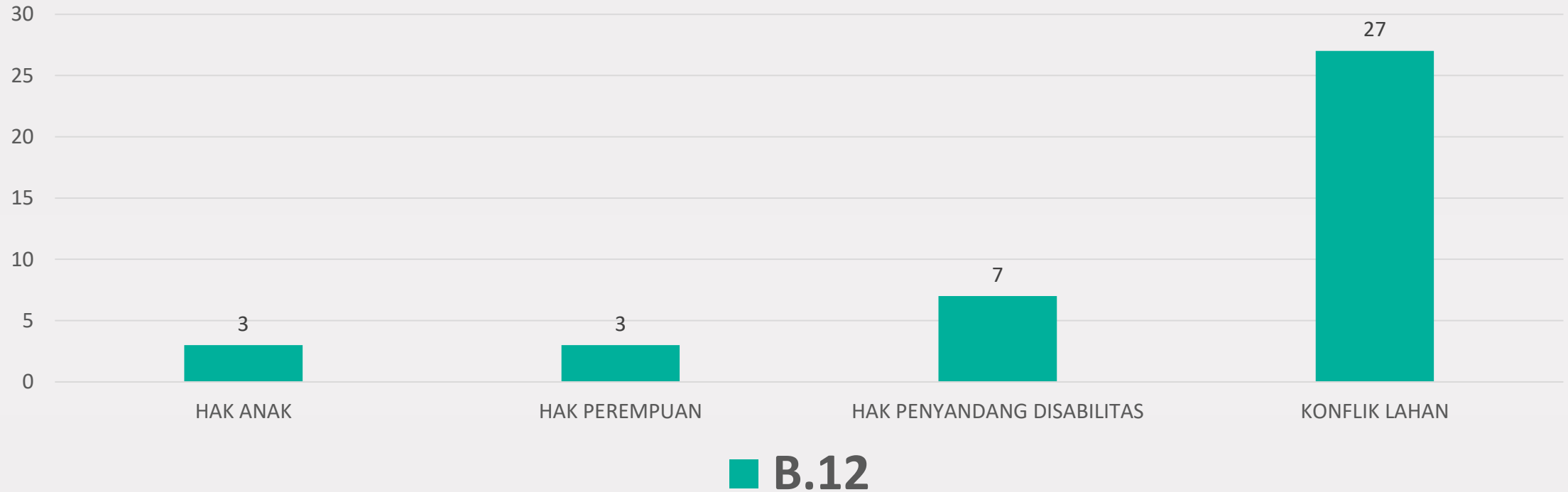
- *Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik*
- *Analisis Berita dan Pendapat Publik*
- *Pengelolaan Jaringan dan Data Center*
- *Pengelolaan Internet dan Intranet*
- *Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur*
- *Penyusunan data statistik sektor Ekonomi & Infrastruktur*
- *Penyusunan data statistik sektor Sospol, Hukum dan HAM*
- *Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah*

Tingkat Resiko ***Ekstrem*** pada Kegiatan:

- *Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik*
- *Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik*
- *Pengamanan Persandian dan Informasi*

AKSI HAM 2019 (B.12)

AKSI HAM DISKOMINFO B.12



Dinas Kominfo diminta untuk menyediakan rekap aduan masyarakat khususnya terkait dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan

TUJUAN SDG's

1. Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua
7. Menjamin Akses Energi Yg Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua
8. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi
9. **Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif & Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi**
10. Mengurangi Kesenjangan Intra & Antar Negara
11. Menjadikan Kota & Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh Dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi & Konsumsi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim & Penanggulangan Kebencanaan
14. Pelestarian & Pemanfaatan Ekosistem Lautan
15. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
16. **Menciptakan Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Kokoh**
17. **Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan 9. *Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif & Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi*

Target 9.c. *Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020*

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Semester 1	Semester 2	Realisasi Anggaran (000)
Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Presentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	20	-	20	26.999.462
Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center	Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan Fiber Optic milik Provinsi Jawa Tengah	SKPD	41	-	41	11.623.240
Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet	Jumlah Kapasitas Bandwith yang tersedia	Mbps	1200	1.500	1.500	6.999.999

Tujuan 16. Menciptakan Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Kokoh

Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019		REALISASI ANGGARAN 2019 (Rp 000)
				SEM 1	SEM 2	
1	2	3	6	7	8	9
Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	%	74	70	141,11	852.750
	Persentase Badan Publik yang terbuka	%	68	70	68	2.586.268
Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur	Jumlah Data Sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System	Data	6500	6.377	9.173	359.250
Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Data Sektor Sosial, Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia yang tersedia dalam Single Data System	Data	7500	7.185	10.583	493.500
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik	DIP	60	55	60	440.484
Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase penyelesaian sengketa informasi	%	81	80	81	2.145.784
Program Pengembangan eGovernment	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	%	45	40	45	4.503.210
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola	Aplikasi	9	8	9	1.988.970
KIP Award	Badan Publik SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi badan publik		42		26	2.150.300
Dialog interaktif keterbukaan informasi publik di Televisi	Dialog interaktif tersebut sehubungan dengan	SKPD	PM		1	
Bimbingan Teknis tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kabupaten Batang dan Kabupaten Jepara	Jumlah Partisipan/ peserta perwakilan badan publik terkait pemerintahan desa di kabupaten Batang (sekretaris desa dan dispermades kabupaten/kota)	peserta	60		65	
Sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> di Lingkungan RSUD Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah RSU Milik Kementerian yang berada di Jawa Tengah, PPID Pembantu OPD Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama Kabupaten/ Kota, Akademisi, dan Organisasi Masyarakat Sipil	Sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> tersebut		PM		1	
Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut dari Forum Group Discussion (FGD) penyusunan instrumen Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	Sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> tersebut		PM		1	
Focus Group Discussion Evaluasi Instrument Self Assessment Quesstionaire (SAQ) Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2020	Sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> tersebut		PM		1	
Seminar Keterbukaan Informasi dan Peningkatan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020			PM		1	

Tujuan 17. *Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan*

Target 16.6. *Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.*

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Semester 1	Semester 2	Realisasi Anggaran (000)
Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Presentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	20	-	20	26.999.462
Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center	Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan Fiber Optic milik Provinsi Jawa Tengah	SKPD	41	-	41	11.623.240
Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet	Jumlah Kapasitas Bandwith yang tersedia	Mbps	1200	1.500	1.500	6.999.999

ANGGARAN 2021

TOTAL USULAN APBD	132.942.227.000
BELANJA LANGSUNG	19.465.978.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	113.476.249.000
<i>EX-BAU</i>	<i>37.421.925.000</i>
SEKRETARIAT	37.421.925.000
<i>URUSAN KOMINFO</i>	<i>77.889.384.000</i>
IKP	29.074.773.000
TIK	36.226.000.000
E-GOV	12.588.611.000
<i>URUSAN STATISTIK</i>	<i>4.981.346.000</i>
STATISTIK	4.981.346.000
<i>URUSAN PERSANDIAN</i>	<i>12.649.572.000</i>
PERSANDIAN & KI	12.649.572.000

DATA JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL

PRANATA HUMAS



5 PNS
1 PNS DALAM
PROSES
INPASSING

PRANATA KOMPUTER



1 PNS
6 PNS DALAM
PROSES INPASIING

STATISTISI



2 PNS,
2 PNS DALAM
PROSES
INPASSING

SANDIMAN



BELUM ADA

Struktur SDM Dinas Kominfo (Formasi Menpan)

Sekretariat (Program, Keuangan dan Umpeg)

- Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- Pengadministrasi Perencanaan dan Program
- Bendahara
- Pengolah Data Laporan Pertanggung-Jawaban Laporan Keuangan
- Verifikasi Data Laporan Keuangan
- Pengadministrasi Laporan Keuangan
- Analisis Jabatan
- Pengelola Kepegawaian
- Pengelola Barang Milik Negara
- Pengadministrasi Kepegawaian
- Pengadministrasi Umum

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- Pranata Humas
- Analis Berita dan Pendapat Umum
- Pengelola Pengaduan Publik
- Analis Berita
- Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
- Penyusun Berita dan Pendapat Umum
- Pengadministrasi Umum

Bidang Statistik

- Statistisi
- Pranata Komputer
- Pranata Humas
- Analis Statistik
- Pengelola Data Informasi Publik (web PPID)
- Analis Sistem Informasi
- Pengelola Pengaduan Publik
- Pengelola Data
- Pengadministrasi Umum

Struktur SDM Dinas Kominfo (Formasi Menpan)

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Pranata Komputer (Ahli + Terampil)
- Pemeriksa Teknologi Informasi
- Pengelola Sistem Data dan Jaringan
- Teknisi Jaringan Instalasi
- Analis Sistem Informasi
- Pengolah Data
- Analis Sumber Daya Iptek
- Pengadministrasi Sistem Informasi

Bidang e_Government

- Pranata Komputer (Ahli+Trampil)
- Analis Sistem Informasi
- Pengelola Situs Web
- Teknisi Sistem Informasi
- Analis Sistem Informasi
- Analis sumber Daya Iptek
- Pengolah Data
- Pengelola Sistem dan Jaringan
- Pengadministrasi Umum

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

- Analis Tata Kelola Keamanan Siber
- Pengolah Data
- Sandiman
- Analis Proteksi Keamanan Siber
- Operator Sandi dan Telekomunikasi
- Penyusun Respon Insiden Keamanan Siber
- Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi
- Analis Sistem Informasi
- Teknisi Sarana dan Prasarana
- Pengadministrasi Umum

MAPPING PENINGKATAN KAPASITAS SDM PER BIDANG

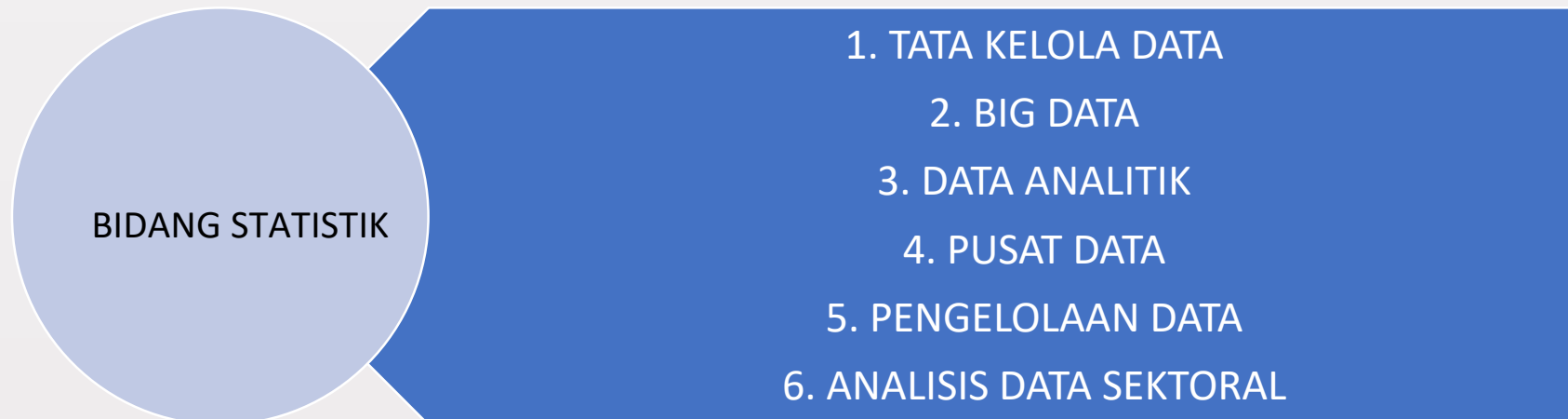
BIDANG TIK

1. PERENCANAAN STRATEGIS TIK
2. PENGELOLAAN & LAYANAN TIK
3. INTERNET OF THING
4. MACHINE LEARNING
5. JARINGAN INTERKONEKSI TERTUTUP
6. PENGUJIAN/TESTING
7. PENGELOLAAN LAYANAN TIK BERBASIS MIKROTIK
8. DATA KELOLA TIK

BIDANG PDKI

1. PENANGANAN INSIDEN
2. DETEKSI KEAMANAN INFORMASI
3. PROTEKSI KEAMANAN INFORMASI
4. PENGELOLAAN RESIKO
5. PENGELOLAAN KI
6. WEB

MAPPING PENINGKATAN KAPASITAS SDM PER BIDANG



MAPPING PENINGKATAN KAPASITAS SDM PER BIDANG

BIDANG IKP

1. DIKLAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
2. DIKLAT TEKNIK OPERASIONAL & KAMERA
3. PENULISAN NASKAH AUDIO VISUAL
4. EDITING VIDEO/AUDIO
5. PRODUKSI AUDIO/VISUAL

STRUKTURAL & SEKRETARIAT

1. DESIGN THINKING INNOVATION
2. GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO),
3. PENGELOLAAN PROYEK
4. SERVICE DESK
5. PENGADAAN BARANG JASA
6. DIKLATPIM
7. KEHUMASAN

TAHUN 2021	USULAN NAMA PELATIHAN	SASARAN PESERTA
Dinas KOMINFO	Digital Leadership	Pejabat struktural
	Tata Kelola Layanan TIK	Pejabat struktural
	Analisis Media	Pranata Humas
	Pengelolaan data center	JFU / JFT
	Pengelolaan jaringan Pemda berbasis Mikrotik	Pranata Komputer
	Keamanan jaringan dan server	JFU / JFT

DAPAT TERLAKSANA APABILA PANDEMI CORONA SUDAH BERAKHIR DAN ANGGARAN TERSEDIA



DIKLAT PADA BSSN

no	nama diklat	Jenis Diklat	rencana pelaksanaan	Peserta
1	penggunaan peralatan sandi pada Pemda	Manajemen	Agustus	Pelaksana pada bidang persandian
2	cyber security awarenes, cyber criminology, and law for decision maker		september	Pejabat struktural
3	cyber security awarenes, cyber criminology, and law and cyber penetration test		september	Pejabat struktural
4	crash program / pelatihan siber dan sandi bagi pejabat UTP		oktober	Pejabat struktural
5	diklat teknis SCS	teknis	Juli	Pelaksana pada bidang persandian
6	diklat teknis kriptografi asimetrik/simetrik		agustus	Pelaksana pada bidang persandian
7	keamanan informasi		september	Pejabat / Pelaksana pada bidang persandian
8	Dasar-dasar kemanan jaringan		september	Pelaksana pada bidang persandian

DIKLAT PADA KOMINFO

no	nama diklat	Jenis Diklat	rencana pelaksanaan	Peserta
1	Diklat pranata humas	Teknis	Agustus	Pranata Humas
2	Network administration tingkat dasar	Teknis	Februari	Pejabat / Pelaksana pada bidang TIK
3	Web proگرامing	Teknis	Februari	Pranata Komputer
4	Graphic design tingkat dasar	Teknis	Februari	Pejabat / Pelaksana pada bidang TIK, E-Gov
5	Web design	Teknis	Maret	Pranata Komputer
6	Multimedia (Intermediate animator) 3D	Teknis	Maret	Pejabat / Pelaksana pada bidang TIK, E-Gov

DIKLAT PADA BPS

no	nama diklat	Jenis Diklat	rencana pelaksanaan	Peserta
1	Diklat teknis komputer	Teknis	Februari	Pejabat / Pelaksana pada bidang Statistik
2	Diklat Teknis Statistik	Teknis	April	Pejabat / Pelaksana pada bidang Statistik
3	Diklat Statistisi	Fungsional	Mei	Fungsional Statistisi
4	Diklat Pranata Komputer	Fungsional	November	Pranata Komputer



REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN 2019 (AUDITED)

I. GRAND TOTAL ASET TETAP :

No	Uraian Jenis Aset Tetap	SALDO AWAL TAHUN 2019		SALDO AKHIR TAHUN 2019	
		Jumlah	Harga	Jml.	Harga
1	2	3		4	
1	1.3.1.01 TANAH	3	6.977.000.000	3	6.977.000.000
2	1.3.2.01 ALAT BESAR	3	1.567.224.500	3	1.567.224.500
3	1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	31	7.311.321.288	30	7.272.614.673
4	1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4	21.050.000	4	21.050.000
6	1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.882	5.615.731.653	1.856	5.690.732.593
7	1.3.2.06 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	429	3.670.800.361	492	4.452.565.361
8	1.3.2.10 ALAT KOMPUTER	732	24.465.264.743	789	42.831.057.080
9	1.3.2.18 RAMBU-RAMBU	1	55.937.000	1	55.937.000
10	1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	11	5.343.961.874	11	5.442.697.874
11	1.3.4.03 INSTALASI	14	349.662.000	14	349.662.000
12	1.3.4.04 JARINGAN	3	113.983.400	3	113.983.400
	Grand Total (Diskominfo & KPID)	3.113	55.491.936.819	3.206	74.774.524.481



II. Aset Tetap KPID

Dalam Aplikasi SIM Aset, KPID ditampung terpisah dengan Dinas Kominfo dalam sub direktori tersendiri.

Jumlah Aset KPID sejak laporan mutasi aset tetap audited 2018 sampai dengan Audited 2019 jumlah Saldo Akhir 2019 masih tetap yakni sebanyak 449 unit dengan nilai Rp. 5.795.656.269,-

ARSIP INAKTIF PERMANEN

Ex. Biro Humas



- Surat Perintah Kerja (SPK) tahun 2012 Sejumlah 8 Bendel



- Bukti Siar (TVRI & MetroTV) tahun 2012 Sejumlah 3 Bendel



- Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2012 Sejumlah 21 bendel



- CD Dokumentasi 70 buah tahun 2012 s.d 2016



Jumlah Surat Masuk & Keluar



	2019	KETERANGAN
Surat Masuk	2.261	Dari SIKD
Surat Keluar		
	220	Dari SIKD
	3.688	Dari e-Morsip
	3.908	TOTAL Surat Keluar
	2020	KETERANGAN
Surat Masuk		
	708	Tercatat aplikasi TNDE (sampai saat ini)
	1.140	Tercatat SIKD (sampai saat ini)
	1.848	TOTAL Surat Masuk
Surat Keluar		
	632	Tercatat aplikasi TNDE (sampai saat ini)
	1.067	Aplikasi Morsip (sampai saat ini)
	1.699	TOTAL Surat Keluar

PPID PEMBANTU DINAS KOMINFO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFO PROV. JATENG NO.



Fungsi Utama

- pengelolaan informasi;
- dokumentasi arsip;
- pelayanan informasi; dan
- pelayanan dan penyelesaian sengketa.



Pengelolaan Informasi


Pengumpulan – Pengelompokkan – Kompilasi –
Penyimpanan – Pengamanan



Pelayanan Informasi

Penyajian Informasi secara aktif (publikasi)
Penyajian Informasi secara pasif (melayani
permohonan informasi, menjawab pertanyaan lwt
telepon, email, wa, dll)


PENYAJIAN INFORMASI



Berkala

Kendala:


- Dinamika anggaran
- LHKPN
- Dinamika Pengadaan Barang/Jasa
- Laporan Kinerja per Bulan



Serta Merta

Kendala:

- Koordinasi yang kurang bagus mengenai materi video/infografis



Setiap Saat

Kendala:

- LHKASN
- Rencana Kerja
- Agenda Internal
- Data Statistik Sektoral

KENDALA LAINNYA



Data di website tidak terintegrasi dengan portal open data jawa tengah



Masih kesulitan untuk menerapkan format WAJIB ISI SKM SEBELUM UNDUH DOKUMEN



Data cenderung statis, medsos PPID Pembantu jadi kurang aktif



Interaksi langsung dengan pengguna cenderung terbatas



